



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**LKIP**

**2024**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

## LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2024

### BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT

Catatan/Koreksi :

1. Sistematika penulisan LKIP **pada BAB I perlu memasukan permasalahan utama atau *strategic Issue* dan** dikonsultasikan dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT, sehingga sistematika penulisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Perlu memasukan Lembaran Verifikasi Level 1 LKIP 2024.
3. Perlu melengkapi PK Revisi 2024 yang sudah ditandatangani oleh PJ Gubernur.

Kupang, 12 Februari 2024

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

  
**Regina Maria Manbait, S.Sos**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196711091995032001

| PARAF HIERARKI            |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Perencana Ahli Muda       |  |
| Penelaah Teknis Kebijakan |  |

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala petunjuk-Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024.

Laporan Evaluasi Kinerja sebagai salah satu parameter kesuksesan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran, sekaligus sebagai salah satu indikator Kinerja Instansi Pemerintah yang dilandaskan atas dasar prinsip akuntabilitas, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi jajaran aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta seluruh stakeholder sebagai alat ukur dan indikator pelaksanaan program pembangunan secara terpadu, terarah, dan terukur.

Laporan Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2024 ini merupakan aktualisasi dari pelaksanaan program kerja Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai acuan dan panduan pelaksanaan program-program bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Diharapkan Laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran mengenai capaian kinerja dari Program, Kegiatan dan Anggaran yang telah direalisasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode Tahun Anggaran 2024.

## DAFTAR ISI

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| KATA PENGANTAR.....                                                               | 1     |
| DAFTAR ISI.....                                                                   | 4     |
| IKHTISAR EKSEKUTIF.....                                                           | 5     |
| Realisasi Target Indikator .....                                                  | 6     |
| BAB I                                                                             |       |
| PENDAHULUAN                                                                       |       |
| 1.1 LATAR BELAKANG .....                                                          | 7     |
| 1.2 DASAR HUKUM .....                                                             | 7-7   |
| 1.3 ISU STRATEGIS ORGANISASI.....                                                 | 8     |
| 1.4 TUJUAN.....                                                                   | 8-8   |
| 1.5 GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT .....            | 7-10  |
| 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN .....                                                   | 11-12 |
| BAB II                                                                            |       |
| PERENCANAAN KINERJA                                                               |       |
| 2.1 VISI.....                                                                     | 15    |
| 2.2 MISI.....                                                                     | 15    |
| 2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....                                             | 16-19 |
| BAB III                                                                           |       |
| AKUNTABILITAS KINERJA                                                             |       |
| 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT..... | 23-24 |
| 3.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja (Iku) Yang Ditetapkan .....     | 27-41 |
| BAB IV                                                                            |       |
| PENUTUP                                                                           |       |
| 4.1 KESIMPULAN.....                                                               | 46-43 |

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Evaluasi Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang diamanatkan kepada setiap Instansi Pemerintah. Tujuan penyusunan LKIP sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Laporan Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja kepada publik dan sekaligus memberikan gambaran mengenai capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024-2026, Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024. Laporan Evaluasi Kinerja disusun melalui pengukuran kinerja dalam Tahun Anggaran 2024 dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dalam hasil Pengukuran Kinerja (PK).

Berdasarkan APBD Perubahan/Pergeseran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, Total Anggaran Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 362.956.754.088,00 dengan realisasi pada SPJ pada Bulan Desember 2024 sebesar Rp 314.887.019.763,00 atau (86.7%), Sisa anggaran Rp. 48.069.734.325,00 (13.3%)

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 terdapat 5 (lima) sasaran strategis yang harus dicapai dengan capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan sebagai berikut :

### Realisasi Target Indikator

Dari 5 (lima) sasaran strategis Laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2024 terbagi dalam 5 (lima) indikator kinerja, dengan capaian kinerja rata-rata kegiatan mencapai 78.4 %.

| Sasaran |                                                                                      | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                            | Target      | Realisasi | %      | Interpretasi           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------|------------------------|
| 1       | Terwujudnya peningkatan pemahaman wawasan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan | Cakupan Partai Politik (11), Organisasi kemasyarakatan (20), forum pembaruan kebangsaan (10), Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/SMK (100) sederajat yang terlibat dalam program penguatan ideologi dan karakter kebangsaan. Total Lembaga : 141 | 141 lembaga | 186       | 131.9% | Melebihi Target        |
| 2       | Terwujudnya Pendidikan politik dan pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur   | Cakupan partai politik (11) dan Lembaga Pendidikan Tingkat SMA/SMK (298) yang terlibat dalam program peningkatan peran partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik. Total Lembaga : 309                                       | 309 lembaga | 208 Orang | 67.3%  | Tidak menca pai target |
| 3       | Meningkatnya jumlah organiasi kemasayarakatan yang di validasi                       | Cakupan peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (49). Total Lembaga : 49                                                                                                                                           | 49 lembaga  | 21        | 42.8%  | Tidak Menca pai Target |
| 4       | Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya                                   | Meningkatnya ketahanan Organisasi kemasyarakatan terhadap ekonomi, sosial dan budaya.( 2 dokumen )                                                                                                                                           | 2 Dokumen   | 1         | 50%    | Tidak Menca pai Target |
| 5       | Terlaksananya peningkatan konflik sosial yang ditangani setiap tahun                 | Cakupan konflik sosial yang ditangani setiap tahun. ( 2 Dokumen)                                                                                                                                                                             | 2 Dokumen   | 2         | 100%   | Mencapai Target        |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk memiliki SAKIP yang merupakan suatu rangkaian sistematis yang terdiri dari penyusunan dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Laporan Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban institusi atau organisasi melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan beserta penggunaan anggarannya.

### **1.2 DASAR HUKUM**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018;
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor : DPPA/A.2/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 15 Februari 2024.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor : DPPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 13 Mei 2024.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor : DPPA/A.3/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 10 Oktober 2024.

### **1.3 ISU STRATEGIS ORGANISASI**

Terdapat 5 (empat) isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertera pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026, sebagai berikut :

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik.
3. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
4. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur merumuskan program prioritas yang merujuk kepada Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Rumusan perencanaan kinerja akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya, yang diantaranya memuat kebijakan, tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja utama serta bidang.

### **1.4 TUJUAN**

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah atas pencapaian perencanaan kinerja target Penetapan Kinerja Tahun 2024.



2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun selanjutnya.

## **1.5 GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NTT**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## 2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kesbangpol Provinsi NTT sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang Kepala Badan didukung oleh oleh 1 (Satu) orang Sekretaris yang membawahi 1 (satu) sub bagian dan 2 (dua) orang Sub koordinator substansi, Kepala Bidang yang masing-masing membawahi 2 (dua) Sub koordinator substansi, seperti uraian sebagai berikut :

1) Sekretariat, terdiri dari :

- Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- Fungsional Perencana.
- Fungsional Keuangan

2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri atas :

- Analis Kebijakan Ahli Muda.

3) Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri atas :

- Analis Kebijakan Ahli Muda

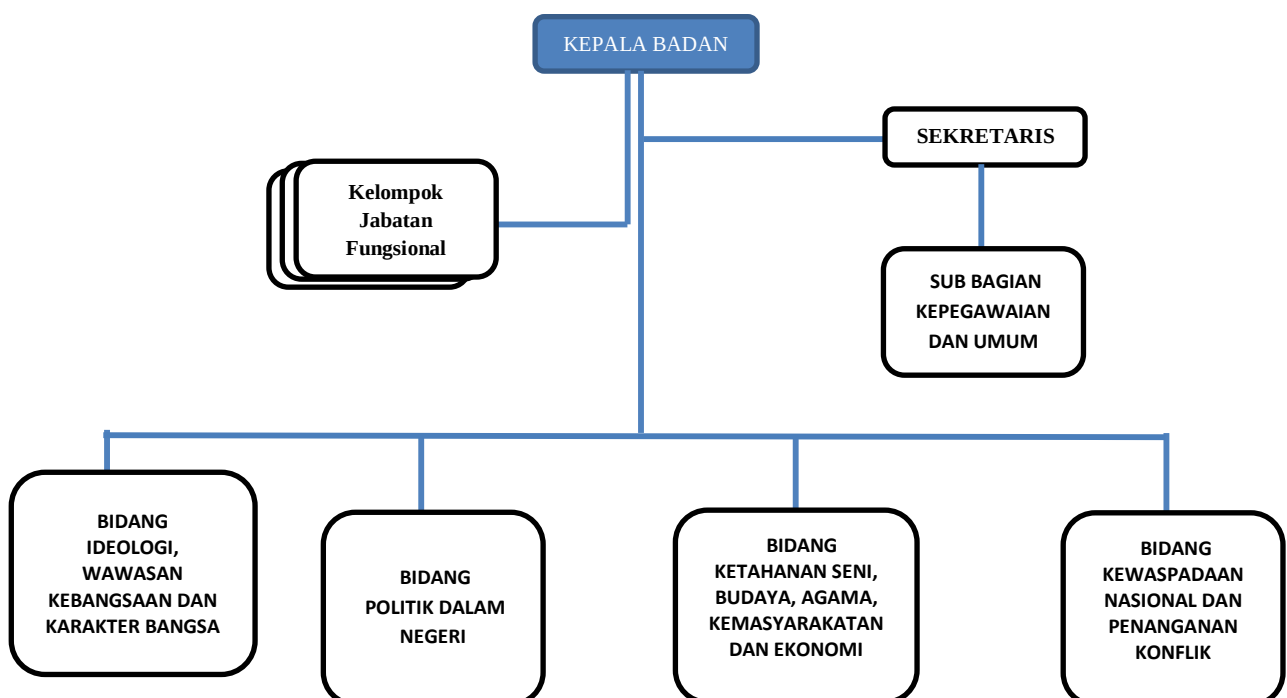
4) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, terdiri atas :

- Analis Kebijakan Ahli Muda

5) Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri atas :

- Analis Kebijakan Ahli Muda

Bagan struktur organisasi Badan Kesbangpol Provinsi NTT



### 3. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2024 sebanyak 31 orang, terdiri dari :

a. PNS sebanyak 31 orang dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Kepala Badan : - orang.
- 2) Sekretaris : 1 orang.
- 3) Kepala Bidang : 4 orang.
- 4) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum di Sekretariat : 1 orang.
- 5) Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda di Sekretariat : 1 orang.
- 6) Perencana Ahli Muda di Sekretariat : 1 orang.
- 7) Pranata Komputer Ahli Pertama di Sekretariat : 2 orang
- 8) Penelaah teknis kebijakan di Sekretariat : 4 orang
- 9) Arsiparis Penyelia di Sekretariat: 1 orang.
- 10) Pengelola layanan operasional : 1 orang
- 11) Analis Kebijakan Ahli Muda di bidang Politik : 1 orang.
- 12) Penelaah teknis kebijakan di bidang Politik : 1 orang
- 13) Penelaah teknis kebijakan di bidang Kewaspadaan Nasional : 2 orang.
- 14) Pengadministrasi Perkantoran di bidang Kewaspadaan Nasional : 1 orang.
- 15) Analis Kebijakan Ahli Muda di bidang Ketahanan : 1 orang.
- 16) Penelaah teknis kebijakan di bidang Ketahanan : 2 orang.
- 17) Pengadministrasi Perkantoran Bidang Ketahanan : 1 orang.
- 18) Analis Kebijakan Ahli Muda di Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan : 1 orang.
- 19) Penelaah teknis kebijakan di Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan: 2 orang.
- 20) Pranata Komputer Ahli Pertama di Bidang Idiologi & Wawasan Kebangsaan: 1 orang
- 21) Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Pertama : 1 orang.

b. Pegawai tidak tetap/tenaga kontrak sebanyak 8 orang :

- 1) Operator komputer : 2 orang
- 2) Tenaga pengemudi : 2 orang
- 3) Tenaga kebersihan : 2 orang
- 4) Tenaga Keamanan : 2 orang

#### 4. Sarana dan Prasarana Kantor

Berikut disajikan sarana dan prasarana yang dalam kondisi baik untuk mendukung kegiatan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain sebagai berikut :

|     |                      |                            |
|-----|----------------------|----------------------------|
| 1)  | Kendaraan roda 4     | : 2 buah                   |
| 2)  | Tenis Meja           | : 1 buah                   |
| 3)  | Papan Nama Kantor    | : 1 buah                   |
| 4)  | Printer              | : 13 buah                  |
| 5)  | Komputer PC/CPU      | : 11 buah                  |
| 6)  | Meja Kerja           | : 59 buah                  |
| 8)  | Handycam             | : 1 unit                   |
| 9)  | LCD Proyektor        | : 1 unit                   |
| 10) | Wirrales             | : 1 unit                   |
| 11) | Sound System         | : 1 set                    |
| 12) | UPS Stabiliser       | : 10 buah                  |
| 13) | Router Modem Wifi    | : 3 unit                   |
| 14) | Tanah Bangunan       | : 4 bidang (pindah kantor) |
| 16) | Laptop               | : 4 unit                   |
| 17) | Kursi Tamu/ Sofa     | : 5 set                    |
| 18) | Kain Gorden          | : 41 lembar                |
| 19) | Lemari Arsip 2 pintu | : 22 buah                  |
| 20) | Berangkas Besi       | : -                        |
| 21) | Rumah Dinas          | : 4 unit                   |
| 22) | Kursi Rapat          | : 43 buah                  |
| 23) | Kulkas 1 pintu       | : 1 buah                   |
| 24) | Kursi Kerja          | : 91 buah                  |
| 25) | Dispenser dan Galon  | : 3 buah                   |
| 26) | Rak Besi             | : 4 buah                   |

## 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari :

### Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi serta sistematika penyajian LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Tahun 2024.

### Bab II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, kebijakan dan program. Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2024 yang menggambarkan tentang sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan serta program dan kegiatan yang harus dilaksanakan.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

#### 3. Capaian Kinerja Organisasi.

Dalam bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 3.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- 3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- 3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra.
- 3.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional ( jika ada).
- 3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- 3.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 3.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
- 3.8 Perbandingan Data Kinerja
- 3.9 Realisasi Anggaran

## Bab IV Penutup

### 4.1 Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja

### 4.2 Kendala Dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

### 4.3 Strategi Pemecahan Masalah.

## 1.7 PERMASALAHAN UTAMA/ STRATEGIC ISSUE

Permasalahan utama pada tahun laporan ini pada tahun 2024 adalah permasalahan hasil dari Lakip tahun 2023 yang mengalami kegagalan atau hambatan atau belum mencapai target. Adalah sebagai berikut :

- 1) Organisasi masyarakat yang mendaftar dan memenuhi aturan dari target 49 (empat puluh sembilan) tetapi yang memenuhi persyaratan adalah 22 (dua puluh dua) organisasi masyarakat.
- 2) Target pelaksana program diimaksudkan adalah 2 Dokumen, yang terdiri dari target 1 Dokumen FKUB tentang Hibah FKUB. Dan 1 Dokumen P4GN tidak dilaksanakan.
- 3) Target dimaksudkan adalah menyelesaikan target 5 Dokumen, dengan realisasi 43 pelaporan dari 53 laporan adalah 81.13 % tidak mencapai 100 % dari target.

Dari uraian tersebut ada 3 dari 5 (lima) sasaran strategis Tahun 2023 terbagi kedalam 5 (lima) indikator kinerja, dengan capaian kinerja rata-rata kegiatan mencapai 79.60 %. Diharapkan pada tahun Laporan 2024 dapat menyelesaikan masalah atau hambatan pada tahun 2023.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang memberikan gambaran dan arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2024-2026 sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Provinsi NTT dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik.

#### 2.1 VISI

Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024-2026 yaitu **“Meningkatkan pengawasan Orang Asing, Lembaga Asing & Tenaga Kerja Asing di Nusa Tenggara Timur dan khususnya di pintu masuk perbatasan dan destinasi pariwisata”**.

Berdasarkan pada Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di atas, visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan sebagai berikut : **“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ”**.

Untuk memberikan pemahaman tentang maksud nilai-nilai dari Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut : **Masyarakat yang cerdas berdemokrasi**, artinya bahwa melalui visi ini seluruh masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih, menggunakan hak pilihnya secara sadar dan bertanggungjawab sehingga tercipta pemerintahan yang terlegitimasi.

#### 2.2 MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang telah digambarkan sebelumnya, misi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024-2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun (2024-2026), sehingga dalam penyusunan Rencana Strategis berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 untuk mendukung pencapaian Visi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan titik berat pada pencapaian Misi Agenda Pembangunan misi ke-5 (lima) yaitu : **Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik**.

## 2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan Sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi sesuai dengan misi yang telah ditetapkan. Rumusan tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.  
Tujuan dan Strategis Badan Kesbangpol Provinsi NTT Tahun 2024

| Tujuan                                                                                          | Sasaran                                                                                 | Strategi                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mewujudkan Birokrasi yang Efektif, Efisien, Akuntabel dan Memberikan Pelayanan Publik yang Baik | ❖ Terwujudnya Peningkatan Pemahaman wawasan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. | Penguatan dan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.                                     |
|                                                                                                 | ❖ Terwujudnya Pendidikan Politik dan Pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur    | Pembinaan dan penguatan terhadap Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik |
|                                                                                                 | ❖ Meningkatnya Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang di validasi                        | Pengendalian, pendataan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                        |
|                                                                                                 | ❖ Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya  | Pengendalian dan Pembinaan ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya      |
|                                                                                                 | ❖ Terlaksananya Peningkatan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun                  | Peningkatan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun.                                                 |
|                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                         |

### A. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

Pada Tahun 2024 Badan Kesbangpol memiliki 5 (lima) Program dengan masing-masing memiliki target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Program Target Kinerja

| No | Program                                               | Kegiatan                                                         | ANGGARAN (Rp)    |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 5.286.002.478,00 |



|    |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2. | Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan                                                                           | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                                                                                                                                         | 2.452.950.010,00   |
| 3. | Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantuan Situasi Politik. | 353.583.374.600,00 |
| 4. | Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                                                                                                              | 209.474.000,00     |
| 5. | Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya                                                               | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                                                                                                                                               | 379.586.000,00     |
| 6. | Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.                             | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.                                                                                                                                                                              | 1.045.367.000,00   |

## B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Penetapan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT didasarkan pada indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Untuk Target kinerja tahun 2024 seperti pada tabel sebagai berikut:

**Tabel Target Kinerja Tahun 2024**

| No | Indikator Sasaran                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                               | 2024                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               | Target                |
| 1  | Cakupan partai politik, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan forum pembaruan kebangsaan yang terlibat dalam program penguatan ideologi dan karakter kebangsaan (141 Lembaga).       | Jumlah Partai Politik (11), Organisasi Kemasyarakatan (20) Forum Pembaruan Kebangsaan (10) dan Lembaga Pendidikan (100) yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga). | 100%<br>(141 Lembaga) |
| 2  | Cakupan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan yang terlibat dalam program peningkatan peran partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik (309 Lembaga). | Jumlah Partai Politik (11) dan Lembaga Pendidikan (298) yang terlibat dalam Program Peningkatan Peran Partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik (309 Lembaga).                               | 100%<br>(309 Lembaga) |
| 3  | Cakupan peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga).                                                                                                          | Jumlah Organisasi Masyarakat                                                                                                                                                                                  | 100%<br>(49 ormas)    |
| 4  | Meningkatnya ketahanan organisasi kemasyarakatan terhadap ekonomi, sosial dan budaya.                                                                                                            | Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kemasyarakatan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan keagamaan                                                                                     | 100%                  |
| 5  | Cakupan konflik sosial yang ditangani setiap tahun.                                                                                                                                              | Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial                                                                                                                                     | 100%                  |

### C. PERJANJIAN KINERJA.

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT tersebut di buat dalam Perjanjian kinerja. Perubahan Perjanjian kinerja merupakan tekat dan janji pimpinan instansi dalam melaksanakan rencana kerja yang telah disusun dimana didalamnya menjanjikan atau menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target/rencana capaiannya serta anggaran yang akan

digunakan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan. Perubahan Perjanjian kinerja tahun 2024, tanggal 02 Juli 2024 adalah sebagai berikut: Dalam perjanjian kinerja juga ditetapkan anggaran untuk setiap kegiatan. Perubahan Perjanjian kinerja sendiri merupakan alat yang bermanfaat untuk mengukur apakah program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan serta untuk mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Perubahan Perjanjian kinerja tahun 2024 pada tanggal 02 Juli 2024, dikarenakan adanya perubahan Pj. Gubernur NTT. Sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Nomor : DPPA/A.3/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 tanggal 10 Oktober 2024.

Total anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT untuk tahun anggaran 2024 adalah Rp. **362.487.932.448,-** yang dipaparkan dalam bab III dan detil realisasi dan penggunaan dapat dilihat dalam dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan variabel indikator kinerja masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Berikut tabel Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja selama tahun 2024. Seperti Lampiran

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

### A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

| NO | SASARAN STRATEGIS                                                                     | INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                                                                | KONDISI | TARGET | FORMULA INDIKATOR                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                  | 2023    | 2024   |                                                                                    |
| 1  | Terwujudnya Peningkatan Pemahaman wawasan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. | Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan , Lembaga Pendidikan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga).      | 97.87%  | 100%   | Jumlah Papol, Ormas, FPK, <u>Lembaga Pendidikan</u> x 100<br>Jumlah Target Lembaga |
| 2  | Terwujudnya Pendidikan Politik dan Pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur.   | Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan yang Terlibat dalam Program Peningkatan Peran Partai politik serta pengembangan etika dan budaya politik (309 Lembaga). | 100%    | 100%   | Jumlah Partai Politik, <u>Lembaga Pendidikan</u> x 100<br>Jumlah Target Lembaga    |
| 3  | Meningkatnya Jumlah Organisasi kemasyarakatan yang di validasi.                       | Cakupan Peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga).                                                                                                          | 44.9%   | 100%   | <u>Jumlah Ormas</u> x 100<br>Jumlah Target Lembaga                                 |
| 4  | Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.                                    | Meningkatnya ketahanan Organisasi Kemasyarakatan terhadap Ekonomi, Sosial dan Budaya. (2 Laporan)                                                                                                | 75%     | 100    | <u>Jumlah Laporan</u> x 100<br>Jumlah Target Laporan                               |
| 5  | Terlaksananya Peningkatan penanganan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun.      | Cakupan Konflik Sosial yang ditangani setiap tahun.( 2 Dokumen)                                                                                                                                  | 81.13%  | 100    | <u>Jumlah Laporan</u> x 100<br>Jumlah Target Laporan                               |

## B. Pelaksanaan Anggaran

| No | Uraian                                                                                                                            | Alokasi                 | Keterangan             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1) | APBD                                                                                                                              |                         |                        |
|    | a) Belanja (Program)                                                                                                              | Rp . 362.472.932.448,00 | Realisasi minimal 85 % |
|    | 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi                                                                                  | Rp. 4.802.180.838,00    | Realisasi minimal 90 % |
|    | 2. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan                                                                           | Rp. 2.452.950.010,00    | Realisasi minimal 85 % |
|    | 3. Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          | Rp. 353.583.374.600,00  | Realisasi minimal 85%  |
|    | 4. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,Sosial, Dan Budaya                                                                | Rp. 209.474.000,00      | Realisasi minimal 85 % |
|    | 5. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Rp. 379.586.000,00      | Realisasi minimal 85 % |
|    | 6. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                             | Rp. 1.045.367.000,00    | Realisasi minimal 85 % |
|    | b) Pendapatan                                                                                                                     | Rp. 15.000.000          | Realisasi minimal 90%  |
|    | Jumlah Belanja + Pendapatan                                                                                                       | Rp. 362.487.932.448,00  |                        |
| 2) | APBN                                                                                                                              |                         |                        |
|    | Program (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)                                                                                          | Rp. -                   | -                      |
|    | 1. -                                                                                                                              | -                       | -                      |
|    | Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan                                                                                           | Rp. -                   | -                      |

- C. Belanja menggunakan Aplikasi *E- Purchasing* (e- catalog dan toko daring) minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;
- D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus di realisasi 100% per tanggal 31 Desember 2024;
- E. Penyampaian LKSKPD paling lambat tanggal 26 Januari 2024, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat tanggal 12 Februari 2024;
- F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2024
- G. Nilai SAKIP minimal BB (>70- 80);
- H. Rata- rata realisasi kinerja individu dalam SKP minimal predikat BAIK;
- I. Persentase tindak lanjut rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut :
  - 1. TL rekomendasi tahun 2024 : Administrasi 100%,keuangan 80%
  - 2. TL rekomendasi di bawah tahun 2024 : Administrasi 100% , keuangan 80%
- J. Jumlah inovasi perangkat daerah minimal 5 (lima) jenis;
- K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;
- L. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik minimal kategori baik ( 76, 61-88, 30);
- M. Tingkat keterbukaan informasi publik minimal kategori menuju informatif (80 -89,99 );
- N. Jumlah kerjasama dengan lembaga mitra / NGO/LSM / Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, yang telah ditetapkan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Program/kegiatan di pertanggungjawaban tersebut meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi. Capaian Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur diukur melalui :

1. Realisasi Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Rumusan Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja IKU yang ditetapkan.

#### 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Badan kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.

Dalam periode tahun 2024 tersedia dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaa Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Aanggaran 2024 DPPA/A.3/1.05.0.00.0.00.01.0000/001.2024. mendapatkan pagu sebesar Rp. **362.472.932.448,00,-** (Tiga ratus enam puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah ) berikut kondisi atau keadaan kas sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang telah dipertanggungjawabkan secara fungsional oleh bendahara Satuan Polisi pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) seperti terlihat pada tabel dibawa ini

| No | Uraian          | Pagu (Rp)             | Sumber Dana |
|----|-----------------|-----------------------|-------------|
| 1. | Belanja Operasi | Rp. 311.763.000.663,- | APBD        |
| 2. | Belanja Pegawai | Rp. 87.591.188,-      | APBD        |

Berikut data realisasi program/kegiatan sub kegiatan bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024 sebagai berikut :

| PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                | PAGU P DPA             | REALISASI (Rp)         | %            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| <b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>                                                     | <b>362.956.754.088</b> | <b>314.885.219.763</b> | <b>86,76</b> |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>                                 | <b>5.286.002.478</b>   | <b>4.399.239.993</b>   | <b>83,22</b> |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                      | <b>132.415.000</b>     | <b>113.509.900</b>     | <b>85,72</b> |
| <i>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</i>                                          | 14.600.000             | 12.395.000             | 84,90        |
| <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> | 103.091.000            | 90.063.900             | 87,36        |
| <i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>                                                     | 14.724.000             | 11.051.000             | 75,05        |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                | <b>3.862.303.000</b>   | <b>3.508.039.465</b>   | <b>90,83</b> |
| <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>                                                     | 3.862.303.000          | 3.508.039.465          | 90,83        |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                    | <b>204.881.554</b>     | <b>148.599.730</b>     | <b>72,53</b> |
| <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>                      | 9.189.000              | 2.888.300              | 31,43        |
| <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>                                               | 22.956.554             | 20.278.050             | 88,33        |
| <i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>                              | -                      | -                      | -            |
| <i>Penyediaan Bahan/Material</i>                                                             | 59.654.000             | 49.868.450             | 83,60        |
| <i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>                                                             | 12.900.000             | 8.327.050              | 64,55        |
| <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                  | 100.182.000            | 67.237.880             | 67,12        |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                      | <b>140.318.000</b>     | <b>85.791.188</b>      | <b>61,14</b> |
| <i>Pengadaan Aset Tetap Lainnya</i>                                                          | 140.318.000            | 87.591.188             | 62,42        |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                  | <b>510.217.924</b>     | <b>483.368.160</b>     | <b>94,74</b> |
| <i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>                                                        | 3.160.000              | 2.200.000              | 69,62        |
| <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>                               | 11.930.000             | 1.520.000              | 12,74        |
| <i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>                                     | 8.757.860              | 5.398.000              | 61,64        |
| <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>                                                 | 486.370.064            | 474.250.160            | 97,51        |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                 | <b>435.867.000</b>     | <b>59.931.550</b>      | <b>13,75</b> |
| <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan</i>                  | 4.000.000              | 1.529.950              | 38,25        |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| <i>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |              |
| <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>                                                                                                                                                                                                                                        | 78.867.000             | 58.401.600             | 74,05        |
| <i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>                                                                                                                                                                                                                    | 353.000.000            | -                      | -            |
| <b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>2.452.950.010</b>   | <b>2.249.093.640</b>   | <b>91,69</b> |
| <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>                                                                                                                                                                         | <b>2.452.950.010</b>   | <b>2.249.093.640</b>   | <b>91,69</b> |
| <i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>                                                                                                                | 59.900.000             | 21.858.350             | 36,49        |
| <i>Pembentukan Paskibraka</i>                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.393.050.010          | 2.227.235.290          | 93,07        |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>                                                                                                                                          | <b>353.583.374.600</b> | <b>306.885.357.280</b> | <b>86,79</b> |
| <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b> | <b>353.583.374.600</b> | <b>306.885.357.280</b> | <b>86,79</b> |
| <i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>                   | 353.583.374.600        | 306.885.357.280        | 86,79        |
| <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>209.474.000</b>     | <b>105.440.150</b>     | <b>50,34</b> |
| <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>                                                                                                                                                              | <b>209.474.000</b>     | <b>105.440.150</b>     | <b>50,34</b> |
| <i>Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>                                                                                                                           | 209.474.000            | 105.440.150            | 50,34        |
| <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>379.586.000</b>     | <b>312.313.500</b>     | <b>82,28</b> |
| <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>                                                                                                                                                                               | <b>379.586.000</b>     | <b>312.313.500</b>     | <b>82,28</b> |
| <i>Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan</i>                                                                                                                                                                                                        | 379.586.000            | 312.313.500            | 82,28        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| <i>Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>                                                                                                                                     |                      |                    |              |
| <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>                                                                                                                                                | <b>1.045.367.000</b> | <b>933.775.200</b> | <b>89,33</b> |
| <b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>                                                                                                                                                  | <b>1.045.367.000</b> | <b>933.775.200</b> | <b>89,33</b> |
| <i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i> | 227.484.000          | 176.470.200        | 77,57        |
| <i>Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi</i>                                                                                                                                                                                                     | 817.883.000          | 757.305.000        | 92,59        |

### 3.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja (Iku) Yang Ditetapkan

**Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) I pada Renstra**

| No. | Indikator Program                                                                                                                                                     | Satuan         | Capaian 2023        | 2024               |           |               | Ket |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------|-----|
|     |                                                                                                                                                                       |                |                     | Target             | Realisasi | Capaian       |     |
| 1.  | Cakupan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam program penguatan ideologi dan karakter kebangsaan / 141 lembaga | Jumlah Lembaga | 85,1% (120 lembaga) | 100% (141 Lembaga) | 131.9%    | (186 Lembaga) |     |

**1) Keberhasilan pada Sasaran strategis Peningkatan Pemahaman Wawasan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (IKU I) didasari dengan pelaksanaan beberapa kegiatan sebagai berikut:**

a) Bimbingan Teknis Aplikasi Paskibraka Tahun 2024

- Hari/Tanggal : Jumat, 16 Februari 2024
- Tempat Pelaksanaan : Hotel Swiss-Belcourt Kupang
- Pembahasan : Kegiatan Bimtek ini membahas tentang aplikasi Paskibraka, apa itu Aplikasi Paskibraka, Tata Cara Pendaftaran dan Porses Seleksi pada Aplikasi Paskibraka secara detail kepada peserta, pentingnya menjaga aspek kesehatan dalam pelaksanaan tugas Paskibraka, tips dan saran praktis tentang bagaimana menjaga kesehatan secara optimal selama proses seleksi dan pendaftaran.

b) Seleksi Anggota Paskibraka Prov. NTT Tahun 2024

Berikut daftar tabel lembaga pendidikan Sekolah Menengah Atas di 22 kab/kota yang mengikuti seleksi Anggota Paskibraka Provinsi NTT Tahun 2024, dengan jumlah lembaga adalah 144, sebagai berikut:

| NO. | ASAL LEMBAGA/SEKOLAH    | Kabupaten/Kota   |
|-----|-------------------------|------------------|
| 1   | SMAS Kristen Waikabubak | Kab. Sumba Barat |
| 2   | SMA Negeri 1 Waingapu   | Kab. Sumba Timur |
| 3   | SMA Negeri 1 Lobalain   | Kab. Rote Ndao   |
| 4   | SMA Negeri 1 Kalabahi   | Kab. Alor        |
| 5   | SMA Negeri Bateti       | Kab. Malaka      |

|    |                                             |                       |
|----|---------------------------------------------|-----------------------|
| 6  | SMK Negeri Witihamas                        | Kab. Flores Timur     |
| 7  | SMAN Plus Kopi Colol                        | Kab. Manggarai Timur  |
| 8  | SMA Negeri 2 Borong                         | Kab. Manggarai Timur  |
| 9  | SMAS St. Arnoldus Jansen                    | Kota Kupang           |
| 10 | SMA Kristen 2 Kupang                        | Kota Kupang           |
| 11 | SMA Negeri Taekas                           | Kab. TTU              |
| 12 | SMA Negeri 2 Waingapu                       | Kab. Sumba Timur      |
| 13 | SMA Negeri 1 Aesesa                         | Kab. Nagekeo          |
| 14 | SMA Negeri 1 Ende                           | Kab. Ende             |
| 15 | SMA Negeri 1 Kupang Timur                   | Kab. Kupang           |
| 16 | SMK Negeri 1 Maumere                        | Kab. Maumere          |
| 17 | SMA Kristen 2 Kalabahi                      | Kab. Alor             |
| 18 | SMA Negeri 1 Komodo                         | Kab. Manggarai Barat  |
| 19 | SMA Negeri 6 Kupang                         | Kota Kupang           |
| 20 | SMA Negeri 1 Soe                            | Kab. TTS              |
| 21 | SMA Negeri 1 Pantai Baru                    | Kab. Rote Ndao        |
| 22 | SMAS Katolik St. Alfonsus                   | Kab. Sumba Barat Daya |
| 23 | SMA Negeri 1 Atambua                        | Kab. Belu             |
| 24 | SMK Negeri 1 Waibakul                       | Kab. Sumba Tengah     |
| 25 | SMA Kristen Waibakul                        | Kab. Sumba Tengah     |
| 26 | SMK Negeri 1 Mambo                          | Kab. Sumba Tengah     |
| 27 | SMA Negeri 1 Maumere                        | Kab. Maumere          |
| 28 | SMA Negeri 1 Kefamenanu                     | Kab. TTU              |
| 29 | SMA Negeri 4 Kupang                         | Kota Kupang           |
| 30 | SMA Negeri 3 Kupang                         | Kota Kupang           |
| 31 | SMAN Baleriwu                               | Kab. Nagekeo          |
| 32 | SMAS Surya Mandala                          | Kab. Flores Timur     |
| 33 | SMA Negeri 1 Bajawa                         | Kab. Ngada            |
| 34 | SMA Negeri 9 Kupang                         | Kota Kupang           |
| 35 | SMAS Katolik St. Fransiskus Xaverius Ruteng | Kab. Manggarai        |
| 36 | SMA Negeri 1 Langke Rembong                 | Kab. Manggarai        |
| 37 | SMAS Frater Don Bosco Lewoleba              | Kab. Lembata          |
| 38 | SMAS Sinar Pancasila Betun                  | Kab. Malaka           |
| 39 | SMK Negeri 7 Kupang                         | Kota Kupang           |

|    |                                           |                |
|----|-------------------------------------------|----------------|
| 40 | SMA Kristen Citra Bangsa                  | Kota Kupang    |
| 41 | SMA Negeri 5 Kupang                       | Kota Kupang    |
| 42 | SMA Kristen Mercusuar Kupang              | Kota Kupang    |
| 43 | SMA Katolik Giovani Kupang                | Kota Kupang    |
| 44 | Sekolah Dian Harapan Kupang               | Kota Kupang    |
| 45 | SMA Negeri 2 Kupang                       | Kota Kupang    |
| 46 | SMA Negeri 8 Kupang                       | Kota Kupang    |
| 47 | SMA Negeri 2 Sulamu                       | Kab. Kupang    |
| 48 | SMA Negeri 1 Sulamu                       | Kab. Kupang    |
| 49 | SMA Negeri 2 Kupang Barat                 | Kab. Kupang    |
| 50 | SMA Negeri 3 Kupang Timur                 | Kab. Kupang    |
| 51 | SMA Negeri 1 Amfoang Barat Daya           | Kab. Kupang    |
| 52 | SMA Negeri 1 Amarasi Barat                | Kab. Kupang    |
| 53 | SMA Negeri 1 Kupang Tengah                | Kab. Kupang    |
| 54 | SMA Negeri 1 Takari                       | Kab. Kupang    |
| 55 | SMA Negeri 2 Takari                       | Kab. Kupang    |
| 56 | SMA Kristen 2 Soe                         | Kab. TTS       |
| 57 | SMK Teknik Anugerah Soe                   | Kab. TTS       |
| 58 | SMA Negeri 1 Mollo Selatan                | Kab. TTS       |
| 59 | SMK Negeri 1 Soe                          | Kab. TTS       |
| 60 | SMK Negeri 1 Kefamenanu                   | Kab. TTU       |
| 61 | SMA Negeri Bikomi Utara                   | Kab. TTU       |
| 62 | SMA Negeri 1 Insana                       | Kab. TTU       |
| 63 | SMA Negeri 1 Insana Tengah                | Kab. TTU       |
| 64 | SMA Warta Bakti                           | Kab. TTU       |
| 65 | SMA Negeri 2 Kefamenanu                   | Kab. TTU       |
| 66 | SMAS Katolik Kefamenanu                   | Kab. TTU       |
| 67 | SMK Negeri Feotleu                        | Kab. TTU       |
| 68 | SMA Negeri Oenupu                         | Kab. TTU       |
| 69 | SMA St. Angela Atambua                    | Kab. Belu      |
| 70 | SMK Negeri 1 Atambua                      | Kab. Belu      |
| 71 | SMA Katolik Suria Atambua                 | Kab. Belu      |
| 72 | SMK Negeri 1 Lobalain                     | Kab. Rote Ndao |
| 73 | SMA Kristen Indonesia Sejahtera Rote Ndao | Kab. Rote Ndao |

|     |                                |                  |
|-----|--------------------------------|------------------|
| 74  | SMA Negeri 1 Rote Barat Laut   | Kab. Rote Ndao   |
| 75  | SMA Kristen Siloam Ba'a        | Kab. Rote Ndao   |
| 76  | SMA Negeri 1 Sabu Barat        | Kab. Sabu Raijua |
| 77  | SMA Negeri 1 Sabu Tengah       | Kab. Sabu Raijua |
| 78  | SMA Negeri 1 Sabu Timur        | Kab. Sabu Raijua |
| 79  | SMAS PGRI Winirai Sabu         | Kab. Sabu Raijua |
| 80  | SMA Negeri Mesara              | Kab. Sabu Raijua |
| 81  | SMA Negeri 1 Raijua Mehara     | Kab. Sabu Raijua |
| 82  | SMAN 1 Liae                    | Kab. Sabu Raijua |
| 83  | SMA Negeri 1 Nubatukan         | Kab. Lembata     |
| 84  | SMA Negeri 1 Buyasuri          | Kab. Lembata     |
| 85  | MAS Nur Salam Lewoleba         | Kab. Lembata     |
| 86  | SMK Negeri 1 Ileape            | Kab. Lembata     |
| 87  | SMA Negeri 2 Nubatukan         | Kab. Lembata     |
| 88  | SMA Negeri 1 Wulandoni         | Kab. Lembata     |
| 89  | MAN Lembata                    | Kab. Lembata     |
| 90  | SMA PGRI Lewoleba              | Kab. Lembata     |
| 91  | SMK Negeri 2 Ende              | Kab. Ende        |
| 92  | SMA Katolik Syuradikara Ende   | Kab. Ende        |
| 93  | SMA Katolik Frateran Ndao      | Kab. Ende        |
| 94  | MAN Ende                       | Kab. Ende        |
| 95  | MAKN Ende                      | Kab. Ende        |
| 96  | SMK St. Isidorus Boawae        | Kab. Nagekeo     |
| 97  | SMAK Stella Maris Marapokot    | Kab. Nagekeo     |
| 98  | SMA Negeri 1 Mauponggo         | Kab. Nagekeo     |
| 99  | SMA Negeri 1 Wolowae           | Kab. Nagekeo     |
| 100 | SMAS St. Clemens Boawae        | Kab. Nagekeo     |
| 101 | MAN Nagekeo                    | Kab. Nagekeo     |
| 102 | SMA Katolik St. Theresia Danga | Kab. Nagekeo     |
| 103 | SMA Negeri 1 Pandawai          | Kab. Sumba Timur |
| 104 | MAS Waingapu                   | Kab. Sumba Timur |
| 105 | SMA PGRI Waingapu              | Kab. Sumba Timur |
| 106 | SMA Negeri 3 Waingapu          | Kab. Sumba Timur |
| 107 | SMA Katolik Anda Luri Waingapu | Kab. Sumba Timur |

|            |                                    |                       |
|------------|------------------------------------|-----------------------|
| 108        | SMK Negeri 1 Waingapu              | Kab. Sumba Timur      |
| 109        | SMA Negeri 1 Rindi Umalulu         | Kab. Sumba Timur      |
| 110        | SMKS Pancasila Tambolaka           | Kab. Sumba Barat Daya |
| 111        | SMK Negeri 1 Wewewa Barat          | Kab. Sumba Barat      |
| 112        | SMAS Manda Elu                     | Kab. Sumba Barat      |
| 113        | SMAS St. Thomas Aquinas            | Kab. Sumba Barat      |
| 114        | SMA Negeri 1 Wewewa Utara          | Kab. Sumba Barat      |
| 115        | SMK Negeri 2 Wewewa Barat          | Kab. Sumba Barat      |
| 116        | SMK Negeri 1 Wewewa Timur          | Kab. Sumba Barat      |
| 117        | SMK Negeri 1 Tambolaka             | Kab. Sumba Barat      |
| 118        | SMA Negeri 1 Wewewa Timur          | Kab. Sumba Barat      |
| 119        | SMA Negeri 1 Waikabubak            | Kab. Sumba Barat      |
| 120        | MAN Sumba Barat                    | Kab. Sumba Barat      |
| 121        | SMK Negeri 2 Loli                  | Kab. Sumba Barat      |
| 122        | SMA Negeri 1 Wanukaka              | Kab. Sumba Barat      |
| 123        | SMA Negeri 1 Waibakul              | Kab. Sumba Tengah     |
| 124        | SMA Negeri 1 Umbu Ratu Nggay Barat | Kab. Sumba Tengah     |
| 125        | SMAK St. Yohanes Noumann           | Kab. Sumba Tengah     |
| 126        | SMA Negeri 1 Poco Ranaka           | Kab. Manggarai Timur  |
| 127        | SMK Negeri 1 Lamba Leda            | Kab. Manggarai Timur  |
| 128        | SMA Negeri 4 Borong                | Kab. Manggarai Timur  |
| 129        | SMK Negeri 1 Borong                | Kab. Manggarai Timur  |
| 130        | SMAK Sanpersi Watumingan           | Kab. Manggarai Timur  |
| 131        | SMAS Katolik St. Arnoldus Mukun    | Kab. Manggarai Timur  |
| 132        | SMA Negeri 5 Poco Ranaka           | Kab. Manggarai Timur  |
| 133        | SMK Cinta Damai Borong             | Kab. Manggarai Timur  |
| 134        | SMA Negeri 1 Kota Komba            | Kab. Manggarai Timur  |
| 135        | SMA Negeri 2 Elar                  | Kab. Manggarai Timur  |
| 136        | SMK Tiara Nusa                     | Kab. Manggarai Timur  |
| 137        | SMA Negeri 6 Kota Komba            | Kab. Manggarai Timur  |
| <b>NO.</b> | <b>ASAL LEMBAGA/SEKOLAH</b>        | <b>Kabupaten/Kota</b> |
| 138        | SMA Negeri Harekake                | Kab. Belu             |
| 139        | SMA Katolik St. Gabriel Wanibesak  | Kab. Malaka           |

|     |                                     |             |
|-----|-------------------------------------|-------------|
| 140 | SMA Katolik Sta. Maria Fatima Betun | Kab. Malaka |
| 141 | SMA Negeri Webriamata               | Kab. Malaka |

- c) Diklat Paskibraka Dalam Rangka Penyelenggaraan Kegiatan Pengibaran Bendera Hari Lahir Pancasila 01 Juni Tahun 2024.
- Hari/Tanggal : 27 Mei - 03 Juni 2024
  - Tempat Pelaksanaan : Hotel Kristal, Kota Kupang, Provinsi NTT
  - Pembahasan : Melalui diklat ini, peserta Paskibraka tahun 2023 diharapkan dapat menjadi generasi muda yang memiliki kesadaran dan komitmen tinggi terhadap kebangsaan, memiliki pemahaman yang kuat tentang tantangan dan ancaman terhadap negara, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, dan aktif dalam berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Diklat ini merupakan landasan yang kuat dalam mempersiapkan peserta sebagai pemimpin muda yang bertanggung jawab dan siap menghadapi tugas-tugas yang akan diemban di masa depan.
- d) Jumlah Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Provinsi NTT Sesuai SK Gubernur NTT Nomor :380/KEP/HK/2024 , 11 November 2024 Berjumlah 45 Orang / lembaga
- e) Rapat Penetapan Kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Ntt 2024-2026.
- Hari/Tanggal : Kamis, 31 Oktober 2024
  - Tempat Pelaksanaan : Kantor Badan Kesbangpol Provinsi NTT
  - Pembahasan : Pada Rapat ini Sesuai SK Gubernur NTT tentang Forum Pembaruan Kebangsaan Provinsi NTT Periode 2024-2026 menetapkan Bapak Ir. Theodorus Widodo sebagai ketua FPK. Dalam pidatonya menyampaikan tekadnya untuk terus mewujudkan misi forum dalam memperkuat kerukunan antar etnis dan keberagaman di Provinsi NTT. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kelompok masyarakat dengan menambah jumlah etnis menjadi sebanyak 17 etnis dari Provinsi NTT dan 22 etnis dari luar Provinsi NTT untuk menciptakan lingkungan yang harmonis.
- f) Rapat Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Ntt 13 November 2024 Terkait Pilkada Damai.
- Hari/Tanggal : Rabu, 13 November 2024
  - Tempat Pelaksanaan : Kantor Badan Kesbangpol Provinsi NTT.



- Pembahasan : Pada Rapat ini membahas mengenai langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendorong Pilkada damai. Beberapa poin utama yang disampaikan yaitu perlunya Meningkatkan sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat dalam menyampaikan pesan damai.
- g) Rapat Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi NTT Terkait penyerahan Surat Keputusan Gubernur NTT.
- Hari/Tanggal : Kamis, 28 November 2024
  - Tempat Pelaksanaan : Kantor Badan Kesbangpol Provinsi NTT.
  - Pembahasan : Pada Rapat ini membahas mengenai rencana kerja dan prioritas untuk periode mendatang dengan fokus pada penguatan integrasi kebangsaan, pembinaan toleransi, dan kegiatan kolaborasi antarbudaya.
- h) Kesimpulan
- Cakupan Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan yang terlibat dalam Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (141 Lembaga) dengan realisasi adalah 141 anggota paskibraka ditambah dengan 45 Anggota FPK adalah 186 Orang/Lembaga. Presentase  $186/141 = 131\%$ .
  - Jumlah target anggota Paskibraka 69 orang, dengan realisasi 141 Orang.
  - Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun : 2 Dokumen, dengan realisasi 2 Dokumen.

**Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) II pada Renstra**

| No. | Indikator Program                                                                                                                                                                                  | Satuan         | Capaian 2023 | 2024                   |           |                        | Ket |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|-----|
|     |                                                                                                                                                                                                    |                |              | Target                 | Realisasi | Capaian                |     |
| 1.  | Cakupan partai politik, organisasi kemasyarakatan Lembaga Pendidikan yang terlibat dalam program peningkatan peran partai politik serta pengembangan etika budaya politik / 309 lembaga/ 600 Orang | Jumlah Lembaga | 90,6 %       | 309 Lembaga atau Orang | 67.3%     | 208 Lembaga atau Orang |     |

**2) Kegagalan pada Sasaran strategis Pendidikan politik dan pembinaan partai politik di Nusa Tenggara Timur pada 11 Partai Politik dan 298 lembaga pendidikan. Berdasarkan kegiatan :**

- a) Rapat Tim Sekretariat Terhadap Dukungan Dana Hibah Pengamanan Tni/Polri Untuk Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi NTT
  - Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2024
  - Tempat Pelaksanaan : Ruang Rapat Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
  - Pembahasan : Pada kegiatan rapat ini membahas hal-hal yang berkenaan dengan Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Penerima Dana Hibah Tahun Anggaran 2024 yang berkaitan dengan Batas waktu Penerimaan Besaran Bantuan Bagi Partai Politik yang memiliki keterwakilan di DPRD Provinsi NTT pada Hasil Pemilu Tahun 2019 sampai dengan 2024 dan Hasil Pemilu Tahun 2024 sampai dengan 2029.
- b) Rapat Fasilitasi Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban Partai Politik Kepada BPK RI Perwakilan NTT Tingkat Provinsi NTT
  - Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024
  - Tempat Pelaksanaan : Aula Badan Kesbangpol Provinsi NTT
  - Pembahasan : Pada kegiatan rapat ini membahas Terpotretnya Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023 untuk dijadikan Acuan terkait Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024 dan Membangun komunikasi politik secara vertikal dan horisontal

untuk mencapai tujuan politik nasional, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai pendidikan politik yang benar dan jujur serta Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang transparan dan akuntabel.

c) Rapat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik dari BPK RI Perwakilan NTT Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juli 2024
- Tempat Pelaksanaan : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
- Pembahasan : Pada kegiatan rapat ini membahas Penyampaian terkait pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2024 dari masing-masing partai politik sudah diterima oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur dan akan ditindaklanjuti dengan mengadakan Rapat Verifikasi Kelengkapan Administrasi Permohonan Bantuan dimaksud sesuai dengan Aturan yang berlaku dan besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan jumlah perolehan suara sah dari masing-masing partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi NTT hasil Pemilu 2019 tidak mengalami perubahan dimana terdapat 11 (sebelas) Partai Politik yang berhak mendapatkan bantuan keuangan partai politik.

d) Rapat Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Hari/Tanggal : Selasa, 28 Juni 2022
- Tempat Pelaksanaan : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
- Pembahasan : Pada kegiatan rapat ini membahas terkait Penyampaian Proposal Permohonan Bantuan Keuangan 11 (sebelas) Partai Politik Tahun 2024 dari masing-masing Partai Politik telah diterima dan di verifikasi oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi saat ini, sesuai peraturan yang berlaku, Hasil Pemeriksaan BPK terhadap LPJ Partai Politik Penerima Bantuan keuangan Tahun Anggaran 2023, yang telah dilaksanakan/audit pada Bulan Januari sampai dengan Mei 2023, telah diserahkan kepada masing-masing Partai Politik, Penyampaian besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan jumlah perolehan suara sah dari masing-masing Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi NTT hasil Pemilu 2019-2024, dimana terdapat 11 (sebelas) Partai Politik yang berhak mendapatkan bantuan keuangan partai politik, dan Menyampaikan Tugas dan tanggungjawab Tim Verifikasi dalam memverifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan

Permohonan Bantuan keuangan oleh Partai Politik dengan kegiatan yang terfokus pada Pendidikan Politik sebesar 60% atau lebih dan Operasional Sekretariat sebesar 40 %.

e) Rapat Tim Sekretariat Bantuan Keuangan Kepada 11 (Sebelas) Partai Politik Tahun 2024 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Hari/Tanggal : Selasa, 15 Oktober 2024
- Tempat Pelaksanaan : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
- Pembahasan : Pada kegiatan rapat ini membahas mengenai pencairan Proposal Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024 yang memiliki keterwakilan di DPRD Provinsi NTT pada Hasil Pemilu Tahun 2024.
- Jumlah peserta :

f) Posko Pemilu/Pilkada Pemantauan dan Pelaporan Evaluasi Perkembangan Politik dan Dinamika Politik di 22 Kab/Kota.

- Waktu Pelaksanaan : 8 Bulan yaitu :
  - 1) Bulan Januari : 10 Orang.
  - 2) Bulan Februari : 7 orang.
  - 3) Bulan Juni : 10 Orang.
  - 4) Bulan Juli : 10 Orang.
  - 5) Bulan Agustus : 10 Orang.
  - 6) Bulan September : 10 Orang.
  - 7) Bulan Oktober : 10 Orang.
  - 8) Bulan November : 10 Orang.
- Tempat Pelaksanaan : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.

**Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) III pada Renstra**

| No. | Indikator Program                                                         | Satuan         | Capaian 2023 | 2024             |           |            | Ket |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|-----------|------------|-----|
|     |                                                                           |                |              | Target           | Realisasi | Capaian    |     |
| 1.  | Cakupan peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan | Jumlah Lembaga | 55,1 %       | 49 Lembaga Ormas | 42.8%     | 21 Lembaga |     |

3) **Kegagalan pada Sasaran Strategis Meningkatnya jumlah organisasi kemasyarakatan yang divalidasi**, seperti tabel berikut ini :

a. **Daftar Organisasi Kemasyarakatan yang di Validasi**

| No | Nama Ormas                                                                        | Bidang Tugas                                                | Pengurus (Ketua)                     | Keterangan     |                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|
|    |                                                                                   |                                                             |                                      | Berbadan Hukum | Periode Kepengurusan |
| 1  | 2                                                                                 | 3                                                           | 4                                    | 5              | 6                    |
| 1  | Yayasan Putri Zaitun Timur                                                        | Keagamaan, Sosial dan Kemasyarakatan                        | Ivana Mersalina Simelot Bureni, S.Pd | Berbadan Hukum | 2022 -2027           |
| 2  | Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Wirausaha Nasional                               | Sosial dan Kemasyarakatan                                   | Yanri Kasseh                         | Berbadan Hukum | 2023 -2027           |
| 3  | Yayasan Flores Chilren Develoment                                                 | Anak, Sosial dan Kemasyarakatan                             | Bona Kowan Kornelis                  | Berbadan Hukum | 2023 -2028           |
| 4  | Ikatan Pemulung Indonesia Perkumpulan Pemulung Indonesia Mandiri                  | Menghimpun Pemulung, Pelapak Pemulung dan Pengiling Mandiri | ery, A.Md                            | Berbadan Hukum | 2023 -2027           |
| 5  | Yayaan Via Dolorosa                                                               | Sosial, Agama, Pendidikan dan Kemasyarakatan                | Ester Ferderika Mau Wakelulu         | Berbadan Hukum | 2020 -2025           |
| 6  | Yayasan Way Mitra Indonesia                                                       | Sosial dan Kemasyarakatan                                   | Deddy Edward                         | Berbadan Hukum | 2024 -2028           |
| 7  | DPD Himpuan Pramuwisata Indonesia                                                 | Sosial dan Kemasyarakatan                                   | Viktor Pance, S.Pd                   | Berbadan Hukum | 2024 -2028           |
| 8  | Dpw Lembaga Pemantau Tindak Pidana Korupsi Nusantara Provinsi Nusa Tenggara Timur | Penegakan Hukum Pelanggaran Pidana Korupsi                  | Romanus Bolli, SH                    | Berbadan Hukum | 2024 -2027           |

|    |                                                                                                        |                                                                   |                                  |                |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| 9  | DPW Forum Pemuda Cendana Wangi NTT                                                                     | Sosial, Kebudayaan dan Kemasyarakatan                             | Yosef Meba, S. Sos, MM           | Berbadan Hukum | 2023 -2027  |
| 10 | Yayasan Kaya Tene Kupang                                                                               | Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan                                 | Zainudin Umari, SH               | Berbadan Hukum | 2024 -2027  |
| 11 | Organisasi Kmanek Oan Rai Klaran P.O (Kork) Cabang Indonesia                                           | Sosial dan Kemasyarakatan                                         | Juvenio Gilberto Dos Reis        | Berbadan Hukum | 2022 - 2026 |
| 12 | Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Nusa Tenggara Timur (Lbh Apik – Ntt) | Sosial dan Kemasyarakatan                                         | Dadrida Rosdiani Djukana, SH, MH | Berbadan Hukum | 2023 - 2028 |
| 13 | Lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Timur                                                          | Memperjuangkan dan melindungi hak anak                            | Veronika Ata, SH, M.Hum          | Berbadan Hukum | 2018 - 2025 |
| 14 | Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur                                          | Sosial dan Kemasyarakatan                                         | Hj. Nuraini HS Wahid, S.Pd.MM    | Berbadan Hukum | 2023 -2028  |
| 15 | Pimpinan Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur                                           | Memperjuangkan hak – hak Sipil dan Politik Penyandang Disabilitas | Hj. AidaChomsah, S.Pd., M.Ag     | Berbadan Hukum | 2019 -2024  |
| 16 | Yayasan Nancy Juni Augusteyn (Nja Foundation)                                                          | Sosial dan Kemasyarakatan                                         | Nancy Juni Augusteyn             | Berbadan Hukum | 2024 -2029  |
| 17 | Dpw Thoriqoh Naqsyabandiyah Indonesia Amirul Aulia Mursyidinal Balai Butari                            | Sosial dan Kemasyarakatan                                         | Ichsan Rachman                   | Berbadan Hukum | 2024 - 2028 |
| 18 | Perkumpulan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat                                                | Sosial dan Kemasyarakatan                                         | I Made Astika Dhana, S.Sos       | Berbadan Hukum | 2022 -2027  |
| 19 | Kaukus Perempuan Politik Indonesia (Kppi Ntt)                                                          | Sosial Kemasyarakatan                                             | Ana Wahan Kolin, SH              | Berbadan Hukum | 2019 -2025  |
| 20 | Yayasan Ginosko El– Emet Pemulihan Sahabat Tuhan (Gepsan)                                              | Sosial Kemasyarakatan                                             | Emilia Bubu                      | Berbadan Hukum | 2024 -2029  |
| 21 | Yayasan Rhema For Indonesia                                                                            | Sosial, Kemanusiaan, Pendidikan dan Keagamaan                     | Kristoforus Ware                 | Berbadan Hukum | 2024 -2029  |

- Kesimpulan : Jumlah peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan (49 Lembaga) dengan realisasi sejumlah 21 Lembaga, Presentasinya sebesar 42%.

**b. Rapat Pertama Tim Pengawasan Ormas/LSM**

- Hari/Tanggal : Jumat, 06 Desember 2024
- Tempat Pelaksanaan : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
- Pembahasan : <sup>1</sup>Jumlah ormas di NTT dan jumlah ormas yang tidak aktif dan penyebabnya. <sup>2</sup>ajaran saksi yehuwa telah mendapatkan ijin dari bimas Kristen kementerian agama tetapi tidak boleh mengajak orang yang sudah beragama. <sup>3</sup> Ditemukan anak-anak sekolah yang menganut ajaran saksi yehuwa sehingga tidak melaksanakan penghormatan saat upacara kenaikan bendera merah putih yang berarti tidak menghormati bendera sebagai lambing negara.

**c. Rapat Kedua Tim Pengawasan Ormas/LSM**

- Hari/Tanggal : Senin, 30 Desember 2024
- Tempat Pelaksanaan : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.
- Pembahasan : <sup>1</sup>Jumlah ormas di NTT dan jumlah ormas yang tidak aktif dan penyebabnya. <sup>2</sup>Ormas Trias Politika belum mengajukan persyaratan untuk mendapatkan SKPO. <sup>3</sup> Ormas relawan Pelita Prabu terus dipantau dalam aktivitas pemberian makanan gratis karena belum mendapatkan SKPO.

**Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) IV pada Renstra**

| No. | Indikator Program                                                                    | Satuan         | Capaian 2023 | 2024      |           |           | Ket |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----|
|     |                                                                                      |                |              | Target    | Realisasi | Capaian   |     |
| 1.  | Meningkatnya ketahanan organisasi kemasyarakatan terhadap ekonomi, sosial dan budaya | Jumlah Laporan | 100%         | 2 Laporan | 50%       | 1 Laporan |     |

- 4) **Kegagalan pada Sasaran strategis Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya** adalah menyelesaikan kegiatan Sosialisasi P4GN dan Hibah kepada FKUB, yang menghasilkan 2 Dokumen Hasil kegiatan. Realisasi pencapaian target adalah Hibah kepada FKUB dengan pihak-pihak terkait sebagai peserta kegiatan. Dan mengefisiensi anggaran untuk belanja hibah dilaksanakan tepat waktu. Dimulai dengan meneliti proposal Hibah dari FKUB sampai dengan pencairan anggaran hibah tersebut.

- FKUB.

Kegiatan pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan melalui proses sebagai berikut :

**a. Penyusunan Surat Keputusan Gubernur tentang FKUB**

Penyusunan atau pembuatan Surat Keputusan Gubernur ini berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Untuk itu yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol sebagai berikut:

- Badan Kesbangpol bersurat kepada organisasi keagamaan untuk meminta nama-nama tokoh agama
- Penyusunan draf Keputusan Gubernur yang selanjutnya diajukan ke biro hukum untuk dokoreksi dan ditandatangani.
- Penetapan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 315/KEP/HK/2024 tanggal 10 September 2024 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024-2026.

**b. Verifikasi dan Klarifikasi proposal Bantuan Keuangan FKUB**

Ferifikasi dan klarifikasi proposal Bantuan Keuangan FKUB dilaksanakan pada Hari Selasa, Tanggal 17 September 2024, bertempat di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur, hasil yang dicapai adalah:

- Terlaksananya Verifikasi dan Klarifikasi terhadap proposal bantuan keuangan



- Telah dilengkapinya persyaratan administrasi oleh FKUB diantaranya Pakta Integritas, Buku Bank dengan Nomor Rekening Bank atas nama FKUB.

**c. Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah/Bantuan Keuangan FKUB**

Penyusunan Naskah Perjanjian Hibah/Bantuan Keuangan KUB didasarkan pada Keputusan Gubernur No. 326/KEP/HK/2024, tanggal 17 September 2024 tentang Hibah Bantuan Keuangan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, hasil yang dicapai adalah:

- Tersusun dan ditanda tangannya Naskah Perjanjian Naskah Hibah Bantuan Keuangan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Ketua FKUB Tingkat Provinsi.

Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Bantuan Keuangan/Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

- Telah diterbitkannya Keputusan Gubernur tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024-2026;
- Telah dilaksanakannya verifikasi dan klarifikasi atas proposal Bantuan Keuangan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Tersusunnya dan ditanda tangannya Naskah Perjanjian Naskah Hibah Bantuan Keuangan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Ketua FKUB Tingkat Provinsi.
- Telah disalurkananya Bantuan Keuangan/Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi NTT Tahun 2024.

- **P4GN**

Tidak dilaksanakan.

**Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) V pada Renstra**

| No. | Indikator Program                                  | Satuan         | Capaian 2023 | 2024      |           |           | Ket |
|-----|----------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----|
|     |                                                    |                |              | Target    | Realisasi | Capaian   |     |
| 1.  | Cakupan konflik sosial yang ditangani setiap tahun | Jumlah Laporan | 100%         | 2 Laporan | 100%      | 2 Laporan |     |

**5) Keberhasilan pada Sasaran strategis peningkatan penanganan konflik sosial yang ditangani**

**setiap tahun.** Adalah menyelesaikan kegiatan pelaporan situasi daerah dari 22 Kabupaten/Kota setiap bulan yang berhubungan dengan pelaporan untuk Forkopimda NTT, Kewaspadaan Nasional di Provinsi NTT, baik itu untuk aktivitas orang asing/lembaga asing dan perbatasan anatar negara. Kebijakan teknis yang menghasilkan Surat Keputusan Gubernur tentang Forkopimda Provinsi NTT, Surat Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Forkopimda Provinsi NTT, Surat Keputusan Gubernur tentang FKDM Tingkat Provinsi NTT.

1. Rapat Pembahasan masalah aktual terkait Penangkapan Nelayan Indonesia oleh Australian Border Force (ABF).
  - Hari/Tanggal : 12 Januari 2024
  - Tempat Pelaksanaan : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
  - Pembahasan : Rapat Pembahasan masalah actual terkait Penangkapan Nelayan Indonesia oleh Australian Border Force (ABF), Pemerintah Australia menangkap 36 orang nelayan Indonesia yang beraktivitas di perairan laut Australia pada tanggal 30 – 31 Desember 2023 dan mereka tidak diturunkan ke darat tetapi selama diatas kapal para nelayan diperlakukan sangat baik. Pada Selasa, 9 Januari 2024 Pemerintah Australia memulangkan 36 orang nelayan Indonesia menggunakan kapal Australian Border Force (ABF). 5 (lima) orang nelayan berasal dari Rote Ndao - NTT, 31 orang nelayan berasal dari Sulawesi dan sudah dipulangkan ke Sulawesi. 3 orang dari 5 orang nelayan Rote tersebut pernah ditangkap pada bulan Februari 2023 dan harusnya dikenakan denda sebesar 1200 dollar Australia namun tidak diketahui informasi mengapa para nelayan tersebut tidak dibawa ke Australia tetapi langsung dipulangkan ke Indonesia. Dihadiri oleh Direktur Intelkam Polda NTT, Kasie Intel Korem 161 Wira Sakti, Ass intel TNI AU, Ass Intel AL, Kanipos Binda, As Intel Kejaksaan, Komandan Bakamla, Kasat Bais Satgas Bais NTT (Celebes), Kasie Intel Satpolair NTT, Kepala Bidang Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.NTT dan Kepala Stasiun PSDKP Prov. NTT.

2. Rapat Pojok Intelijen.

- Hari/Tanggal : 27 Februari 2024
- Tempat Pelaksanaan : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
- Pembahasan : Rapat ini membahas terkait Perkembangan Tahapan Pemilihan Umum dan Persoalan Keributan Warga Asal Sumba di Provinsi Bali. Dihadiri oleh Polda NTT, Kasi Intel Korem 161 Wira Sakti. Kasi Intel TNI AU, Kasie Intel TNI AL, Kabag Ops BINDA, Kasie Intel Kejaksaan Tinggi NTT, Dinas Kopnakertrans, KPU NTT dan Bawaslu NTT.

3. Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Koordinasi Dan Kerja Sama Intelijen Dalam Rangka Pelaporan Situasi Daerah Untuk Pelaksanaan Forkopimda Pada Kab. Manggarai Barat, Kab. Sumba Timur, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Lembata, Kab. Belu Dan Kab. Rote Ndao. pelaksanaan kegiatan dilaksanakan untuk Mendapatkan informasi dan data mengenai potensi dan permasalahan-permasalahan strategis dan mengumpulkan SK pembentukan Tim Forkopimda, SK Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan SK Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing.

4. Rapat Pojok Intelijen bersama Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

- Hari/Tanggal : 30 April 2024
- Tempat Pelaksanaan : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT
- Pembahasan : Rapat ini membahas terkait terkait Persediaan Stok Pangan dan Kasus Rabies dan Flu Babi (ASF). Dihadiri oleh Polda NTT, Kasi Intel Korem 161 Wira Sakti. Kasi Intel TNI AU, Kasie Intel TNI AL, Kabag Ops BINDA, Kasie Intel Kejaksaan Tinggi NTT, Dinas Peternakan Prov. NTT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NTT, Kepala Kantor Wilayah Badan Urusan Logistic NTT dan Dinas Ketahanan pangan Prov. NTT serta Ketua FKDM dan Anggota FKDM.

5. Kegiatan Rapat Pojok Intelijen.

- Hari/Tanggal : 17 September 2024
- Tempat Pelaksanaan : Hotel Kristal Kupang.
- Pembahasan : Pembahasan terkait Politik Identitas, Isu SARA, Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2024. Dihadiri oleh Polda NTT, Kasi Intel Korem 161 Wira Sakti. Kasi Intel TNI AU, Kasie Intel TNI AL, Kabag Ops BINDA, Kasie Intel Kejaksaan Tinggi NTT.

6. Rapat Pojok Intelijen bersama FKDM.

- Hari/Tanggal : 18 Oktober 2024
- Tempat Pelaksanaan : Aula Badan Kesbangpol.

- Pembahasan : Rapat ini membahas terkait situasi Daerah jelang pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dan dihadiri oleh Polda NTT, Kasi Intel Korem 161 Wira Sakti. Kasi Intel TNI AU, Kasie Intel TNI AL, Kabag Ops BINDA, Kasie Intel Kejaksaan Tinggi NTT dan Anggota FKDM.
7. Rapat Forkopimda
- Hari/Tanggal : 24 September 2024
  - Tempat Pelaksanaan : Ruang Rapat Rumah Jabatan Gubernur NTT.
  - Pembahasan : Terkait persiapan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan terjadi pada tanggal 27 November 2024 untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan Pilkada, Gerakan Kemanusia Penanganan Stunting di Nusa Tenggara Timur, dan Penanganan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Nusa Tenggara Timur.
8. Rapat Forkopimda.
- Hari/Tanggal : 10 November 2024
  - Tempat Pelaksanaan : Ruang Rapat Rumah Jabatan Gubernur NTT.
  - Pembahasan : Rapat ini membahas terkait Peristiwa Erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki sejak tanggal 23 Desember 2023 atau  $\pm$  10 (sepuluh) bulan, semula berada level IV dan 3 bulan terakhir pada level III (siaga). Pada tanggal 04 November 2024, jam 23.24 wita langsung terjadi letusan dengan eskalasi yang besar dan rilis dari PVMBG berubah status menjadi Level IV (Awas) dan radius dari 4,5 km-5 km naik menjadi radius 7 km dari pusat erupsi. Kondisi ini memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat dan mengakibatkan korban jiwa dan harta benda berupa kerusakan rumah warga dan fasilitas umum lainnya. Dihadiri oleh para anggota Forkopimda, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT dan Plt Kepala Badan Kesbangpol Prov.NTT.
9. Rapat Koordinasi Penanganan Konflik bersama para Kepala Badan Kesbangpol dan Kepala Bidang Penanganan Konflik se-Prov NTT dan FKDM serta para Kominda Provinsi NTT.
- Hari/Tanggal : 22 - 23 November 2024
  - Tempat Pelaksanaan : Hotel Kristal Kupang.
  - Pembahasan : Rapat ini membahas mengenai Penanganan Konflik Pra Pilkada Tahun 2024.
10. Rapat Pembahasan Masalah Aktual.
- Hari/Tanggal : 17 Desember 2024

- Tempat Pelaksanaan : Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.NTT.
- Pembahasan : Rapat ini membahas mengenai situasi daerah jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Rapat ini dihadiri oleh Perwakilan Bulog, Perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov.NTT, Kasie Intel Lantamalam VII Kupang, Kasie Intel Kodim Wirasakti 161 Kupang, Kasie Intel Lanud El Tari, Kabag Ops Binda, dan Kasie Intel Polda NTT.

#### 11. Kesimpulan

- Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah : 100 org, dengan realisasi adalah 156 Orang. Presentase 156%.

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi : 2 dokumen dengan realisasi 2 dokumen. Presentase 100%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Penyajian Laporan Kinerja ini didasarkan pencapaian sasaran strategis melalui pengukuran realisasi pada Indikator Kinerja Utama yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT. Untuk itu dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

##### **A. Keberhasilan Dan Kegagalan Kinerja**

Dalam rangka mencapai kinerja sasaran Tahun 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT telah melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja secara keseluruhan dari 5 (lima) sasaran strategis. Disamping itu penyusunan LKIP ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT pada tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja secara keseluruhan dari 5 (lima) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator berdasarkan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Dari 5 (lima) sasaran strategis tahun 2024 terbagi kedalam 5 (lima) indikator kinerja, diantara 5 indikator kinerja tersebut yang mencapai target sebanyak 2 indikator dan 3 indikator tidak mencapai target dengan capaian kinerja rata-rata mencapai 78,4% dengan capaian Kinerja Keuangan 85,90 % dan Kinerja Fisik 100%. Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT didukung dengan adanya 6 (enam) Program dan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 362.472.932.448 ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 311.763.000.663,- atau sebesar 85,90 %, sisa anggaran Rp. 48.069.734.325 ,-

##### **B. Kendala Dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja**

Pada tahun 2024 terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT meliputi :

1. Sumberdaya yang terbatas dihadapkan pada dinamika sosial dan politik yang demikian cepat.
2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;

##### **C. Strategi Pemecahan Masalah**

Dalam menghadapi kendala dan hambatan yang ada, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT melakukan langkah-langkah demi meminimalisir kendala-kendala yang ada, sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan stake holder terkait seperti FKUB, FKDM dan FPK.
2. Meningkatkan verifikasi pendaftaran Ormas.
3. Meningkatkan partisipasi lembaga pendidikan tingkat SMA/ sederajat, partai politik, Organisasi masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT.
4. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi untuk membangun kesamaan dan kesatuan data dengan sumber atau penyedia data, baik OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun lembaga-lembaga vertikal yang ada, antara lain Kepolisian Daerah Provinsi NTT, TNI, Imigrasi, Departemen Agama, Dirjen Pemerintahan Umum dan Politik Kementerian Dalam Negeri.
5. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan pendidikan politik kepada lembaga pendidikan tingkat SMA/ Sederajat, untuk meningkatkan pengetahuan tentang 4 (empat) Konsensus Bangsa, serta hak dan kewajiban sebagai pemilih pemula.

Kupang, 07 Februari 2025



Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Nusa Tenggara Timur

**Regina Maria Manbait, S.Sos**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196711091995032001

| Paraf Hierearki           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Perencana Ahli Muda       | <i>[Signature]</i> |
| Penelaah Teknis Kebijakan | <i>[Signature]</i> |

